

Judul : Terima Aspirasi DPRD Papua: Komisi VI Advokasi Korban Limbah PTFI
Tanggal : Kamis, 02 Februari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Terima Aspirasi DPRD Papua

Komisi VI Advokasi Korban Limbah PTFI

KOMISI IV DPR sepakat melakukan advokasi atas dampak kegiatan pembuangan limbah tailing PT Freeport Indonesia (PTFI) selama menjalankan operasinya. Upaya ini dilakukan setelah DPR menerima pengaduan masyarakat dan pegiat lingkungan di Mimika yang dirugikan dari limbah ini.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menuturkan, ada dua upaya advokasi yang dilakukan parlemen. Pertama, melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang PTFI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), para bupati dan gubernur di Papua serta unsur Pimpinan DPRD Papua.

“Cuma kalau untuk kehadiran (wakil) masyarakat, ya silakan pintar-pintarnya DPRD ajak masyarakatnya,” kata Dedi dalam RDPU dengan DPR Papua dan wakil masyarakat korban limbah tailing PTFI di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Kedua, pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke areal yang disebut-sebut sebagai sumber malapetaka bagi masyarakat Papua. Dengan kunjungan langsung ke lapangan, upaya advokasi dan pembelaan kepada masyarakat adat akan menjadi jauh lebih mudah.

“Kita bisa menunjukkan ke PTFI langsung, ini loh dampak yang diakibatkan apabila itu memang dilakukan oleh PTFI,” ujarnya.

Dedi bilang, setiap potensi pelanggaran yang ditemukan di lapangan mesti dipertanggungjawabkan, kemudian dilakukan evaluasi sebagai upaya pembenahan dalam pengelolaan tambang di Papua.

“Semua yang ada di sini harus hadir terutama dari (anggota dewan) dapil Papua harus memimpin delegasi untuk membela rakyat Papua,” jelasnya.

Anggota DPRD Provinsi Papua John NR Gobay menuturkan, pihaknya telah menerima aspirasi dan keluhan yang cukup banyak dari masyarakat terhadap persoalan pengelolaan tambang PTFI. Persoalan tersebut mulai dari pendangkalan yang terjadi di muara-muara sungai yang ada di dalam maupun di

luar dari wilayah yang diijinkan untuk pembuangan tailing milik PTFI.

Kondisi ini pula yang menyebabkan masyarakat di 3 distrik di Kabupaten Mimika yaitu Mimika Timur jauh, Jita, dan Aglimuga mendapat dampak berat dari pembuangan limbah tailing ini.

“Persoalan utama yang dihadapi adalah hilangnya mata pencaharian masyarakat,” jelasnya.

Menurutnya, sumber makanan masyarakat Timika makin tergerus lantaran sungai tempat mencari sagu dan berbagai sumber protein lainnya terganggu oleh adanya pembuangan tailing dari Freeport.

Tidak hanya itu, masyarakat terutama anak-anak banyak yang mengalami sakit akibat

lingkungan tempat hidup mereka sudah tercemar berat. “Beberapa pulau juga telah hilang karena tertutup endapan (*tailing*) dan lain-lainnya,” tegasnya.

Pegiat lingkungan dari Yayasan Lorentz Timika, Dolfina Kum mendesak dilakukan audit menyeluruh atas operasi PTFI di Papua. Mereka meminta agar penegakan hukum dilakukan serta pemulihan atas seluruh kerusakan lingkungan hidup baik di wilayah lingkaran tambang dan wilayah pesisir Timika yang ada di 3 distrik.

“Mendesak Pemerintah dan DPR segera memerintahkan kepada PTFI untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami warga dan lingkungan hidup,” tegasnya. ■ KAL